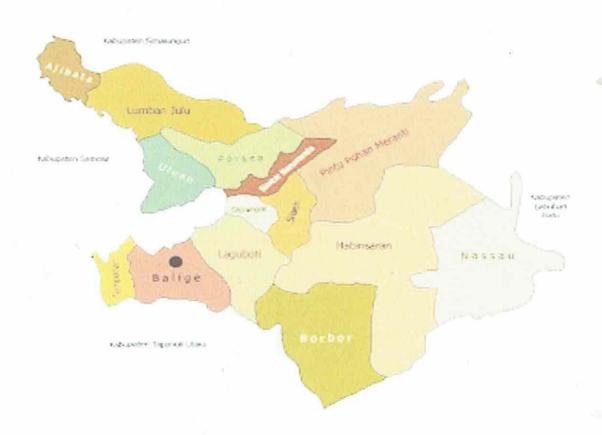


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA NOMOR© TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Mulia Raja No. 26 Balige website: disdukcapil.tobakab.go.id

2023



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Mulia Raja No. 26 Balige website: disdukcapil.tobakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA

NOMOR MATAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA

- Menimbang: a.
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
 - b. bahwa Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan tanggal 24 November 2022 membahas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba terhadap permasalahan yang terjadi untuk mendapatkan usulan rekomendasi perbaikan sesuai dengan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Nomor: 001/BA-FKP/2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 6. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 7. Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 8. Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 9. Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peranturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

10. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN DINAS STANDAR PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA.

KESATU

: Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
 - a. Penerbitan Biodata Penduduk;
 - b. Penerbitan Kartu Keluarga; 🚿
 - c. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; V
 - d. Penerbitan Kartu Identitas Anak; 🗸
 - e. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan;
 - f. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - g. Pencatatan Kelahiran; *
 - h. Pencatatan Lahir Mati; 🗸
 - i. Pencatatan Perkawinan;
 - i. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
 - k. Pencatatan Perceraian; V
 - Pencatatan Pembatalan Perceraian;
 - m.Pencatatan Kematian; V
 - n. Pencatatan Pengangkatan Anak;/\
 - o. Pencatatan Pengakuan Anak; √
 - p. Pencatatan Pengesahan Anak; \
 - q. Pencatatan Perubahan Nama; 📦

r. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;

s. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; \

t. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil; ×

u.Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

KETIGA

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Balige Pada tanggal A Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA

NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TOBA

1. PENCATATAN BIODATA PENDUDUK

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setelah Penduduk melakukan pelaporan: a. surat pengantar dari kepala desa/lurah; b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan c. bukti pendidikan terakhir. Pencatatan Biodata Penduduk WNI yang dilakukan terhadap WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah dan belum memiliki NIK, setelah Penduduk melakukan pelaporan: a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia. Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing (OA) yang memiliki izin tinggal terbatas atau OA yang memiliki izin tinggal terbatas atau OA yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Pencatatan Biodata Penduduk OA yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Pencatatan Biodata Penduduk OA yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Pencatatan Biodata Penduduk OA yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan: a. Dokumen Perjalanan; b. surat keterangan tempat tinggal; dan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 c. kartu izin tinggal tetap. a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.

KOMPONEN	URAIAN
Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Biava/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
X	Biodata Penduduk.
Biaya/Tarif Produk Pelayanan Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	
	Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pelayanan Penanganan Aduan, Saran dan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
		Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang
		Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana	a. komputer (4 unit);
	dan/atau Fasilitas	b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
		d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); dan
6.	Jaminan	b. operator SIAK (4 orang).a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di
	Pelayanan	Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan
		e. tersedia CCTV.

No	KOMPO	NEN	URAIAN
8,	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	 a. rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan
			 b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2. PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI :
		a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau
		kutipan akta perceraian;
		b. surat keterangan pindah/surat keterangan
		pindah datang bagi Penduduk yang pindah
		dalam wilayah NKRI;
		c. surat keterangan pengganti tanda identitas
		bagi Penduduk rentan Administrasi
		Kependudukan; dan
		d. Petikan Keputusan Presiden tentang
		pewarganegaraan dan berita acara pengucapan
		sumpah atau pernyataan janji setia bagi
		Penduduk WNI yang semula
		berkewarganegaraan asing atau petikan
		Keputusan Menteri yang menyelenggarakan
		urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
		Penerbitan KK baru untuk Penduduk OA :
		a. izin tinggal tetap;
		b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau
		kutipan akta perceraian atau yang disebut
		dengan nama lain; dan
		c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang
		pindah dalam wilayah NKRI.
		Penerbitan KK karena perubahan data :
		a. KK lama; dan
		b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa
		Kependudukan dan Peristiwa Penting.
		Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi
		Penduduk WNI:
		a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau
		KK yang rusak; dan
		b. KTP-el.
		Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk OA :
		a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
		b. kartu izin tinggal tetap; dan
		c. KTP-el.
2.	Sistem,	a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan
	Mekanisme dan	dan Pencatatan Sipil dengan membawa
	Prosedur	persyaratan;
		b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan
		Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta
		meregistrasi berkas;
		c. operator merekam data melalui pengentrian
		data;
		d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
		Sipil menandatangan dokumen secara
		elektronik; dan
		e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan
		kepada masyarakat melalui petugas.

KOMPONEN	URAIAN
Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
Produk Pelayanan	Kartu Keluarga.
	angka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pelayanan Penanganan Iduan, Saran dan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala
5.	Jumlah Pelaksana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan
		 melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)

No	ice Delivery) KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI :
	3,	a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah
		kawin, atau pernah kawin; dan
		b. KK.
		Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk OA yang
		memiliki izin tinggal tetap :
		a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah
		kawin, atau pernah kawin;
		b. KK;
		c. Dokumen Perjalanan; dan
		d. kartu izin tinggal tetap.
		Penerbitan KTP-el karena pindah datang bag
		Penduduk WNI dalam wilayah NKRI :
		a. surat keterangan pindah dari Disdukcapi
		Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
		Kabupaten/Kota; dan
		b. KK.
		Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WN.
		yang datang dari luar wilayah NKRI :
		a. surat keterangan pindah dari Perwakilar
		Republik Indonesia; dan
		b. KK.
		Penerbitan KTP-el karena pindah datang bag
		Penduduk OA yang memiliki izin tinggal tetap :
		a. surat keterangan pindah.
		Penerbitan KTP-el karena perubahan data bag
		Penduduk WNI atau Penduduk OA yang memilik
		izin tinggal tetap :
		a. KK;
		b. KTP-el lama;
		c. kartu izin tinggal tetap; dan
		d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa
		Kependudukan dan Peristiwa Penting. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bag
		Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bag Penduduk OA yang memiliki izin tinggal tetap :
		a. KK;
		b. KTP-el lama;
		c. Dokumen Perjalanan; dan
		d. kartu izin tinggal tetap.
		Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bag
		Penduduk WNI atau OA yang memiliki izin tingga
		tetap:
		a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
		b. KTP-el yang rusak;
		c. KK;
		d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau
		Dokumen Perjalanan; dan
		e. kartu izin tinggal tetap.
		Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh
		Disdukcapil Kabupaten/Kota di luar domisili :
		a. tidak melakukan perubahan data Penduduk
		dan
		b. KK.

No	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan;
		 b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas;
		c. operator merekam data melalui pengentrian data;
		d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan
		e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak
	Pelayanan	persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5,	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
6.	Penanganan	a. Surat:
	Aduan, Saran dan Masukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige.
		b. Tatap Muka :
		Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
		c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Toba;
		d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com
		e. Telepon: 082370938301
		f. Whattsapp: 082370938301
		g. Short Massage Service (SMS): 082370938301h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No KOMPONEN	URAIAN
	mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
	a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
	b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
	c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
	d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
	e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (2 unit);b. printer fargo (2 unit);c. Scanner (2 unit); dand. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); danb. operator SIAK (2 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan
		 melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

4. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

No	KOMPONEN	URAIAN
No 1.	Persyaratan	Penerbitan KIA baru bagi anak WNI usia kurang dari 5 tahun: a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/wali; dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. Penerbitan KIA baru bagi anak WNI usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari: a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/wali; c. KTP-el asli kedua' orang tuanya/wali; dan d. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar. Penerbitan KIA karena hilang: a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Penerbitan KIA karena rusak: a. KIA yang rusak. Penerbitan KIA baru bagi anak OA usia kurang dari 5 tahun: a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap; b. KK asli orang tua; dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya. Penerbitan KIA baru bagi anak OA usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari: a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap; b. KK asli orang tua; dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 (dua) lembar. a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui patugas
3.	Jangka Waktu Pelayanan	kepada masyarakat melalui petugas. 1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak.

No	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan; c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan); d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan e. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
		Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (2 unit);b. printer fargo (2 unit);c. Scanner (2 unit); dand. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (2 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan
		 b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

5. PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah NKRI : a. KK.
		Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi : a. KK;
		b. kartu seleksi calon transmigran; dan
		c. surat pemberitahuan pemberangkatan.
		Pendaftaran pindah datang Penduduk OA yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah NKRI :
		a. KK; b. KTP-el;
		c. Dokumen Perjalanan; dan
		d. kartu izin tinggal tetap.
		Pendaftaran pindah datang Penduduk OA yang
		memiliki izin tinggal terbatas dalam wilayah NKRI :
		a. surat keterangan tempat tinggal;
		b. Dokumen Perjalanan; dan
		c. kartu izin tinggal terbatas. Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar
		wilayah NKRI untuk menetap :
		a. KK; dan
		b. KTP-el.
		Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI untuk menetap di Indonesia :
		a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
		b. surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil kabupaten/kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik
		Indonesia.
		Pendaftaran bagi OA yang datang dari luar wilayah NKRI dengan izin tinggal terbatas :
		a. Dokumen Perjalanan; dan
		b. kartu izin tinggal terbatas.
		Pendaftaran bagi OA dengan izin tinggal terbatas
		dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar
		wilayah NKRI :
		a. KK; dan
		b. KTP-el; atau c. surat keterangan tempat tinggal.
		Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah NKRI pindah ke negara lainnya :
		a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara asal; dan
		b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

No	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian
		data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan
		e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah luar negeri.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	KOMPONEN	URAIAN
		mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
		a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
		 d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
		e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
		Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19
		Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
4.	Pengawasan	d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
	Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); danb. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPO	NEN	URAIAN
8.	Evaluasi Pelaksana	The state of the s	 a. rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

6. PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan : a. mengisi formulir biodata keluarga WNI
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. identifikasi kepemilikan dokumen kependudukan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	dokumen kependudukan.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No KOMPONEN	URAIAN
	mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
	a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
	b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
	 Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
	 d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
	e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan yang telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan atas Undang-Undang
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan;
		b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
		tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
		Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
		Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
		Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
		Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah
		Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019
		tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
		Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19
		Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana	a. komputer (6 unit);
	dan/atau Fasilitas	b. Printer dokumen (4 unit)
		c. printer fargo (2 unit);
		d. Scanner (2 unit); dan
		e. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi	 a. memahami Administrasi Kependudukan;
	Pelaksana	b. terampil mengoperasikan komputer dan
		teknologi informasi;
		 c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
		d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas
6.6	Internal	Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); dan
		b. operator SIAK (2 orang).
6.	Jaminan	a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di
	Pelayanan	Lingkungan Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan
		b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi
		Pegawai pada Dinas Kependudukan dan
7.	Jaminan	Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
1,	The Committee Control of the Control	a. petugas pelayanan informasi;
	Keamanan dan Keselamatan	b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk
	Pelayanan	c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna
	- vanj mateta	layanan serta bersih dan rapi;
		d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan
		yang berkebutuhan khusus; dan
		e. tersedia CCTV.
		b. jika dalam berkas permohonan ada telepon
		pemohon akan dihubungi lewat telepon.

No	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan
		 b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

7. PENCATATAN KELAHIRAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan kelahiran WNI dari orang tua yang
		perkawinannya sah :
		a. surat keterangan kelahiran/surat pernyataan
		tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran;
		b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau
		bukti lain yang sah;
		c. KK; dan
		d. KTP-el.
		Pencatatan kelahiran WNI dari orang tua yang
		perkawinannya tiďak memiliki buku nikah/kutipan
		akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri :
		(ALACAMANA) (1) (A)
		a. surat keterangan kelahiran/surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran;
		b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri;
		c. KK; dan
		d. KTP-el.
		Pencatatan kelahiran WNI dari orang tua yang
		perkawinannya tidak memiliki buku nikah/kutipan
		akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi
		status hubungan dalam KK tidak menunjukkan
		sebagai suami istri :
		a. surat keterangan kelahiran/surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data
		kelahiran;
		b. KK; dan
		c. KTP-el.
		Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak
		diketahui asal usulnya atau keberadaan orang
		tuanya : a. berita acara dari kepolisian; atau
		b. surat keterangan kelahiran/surat pernyataan
		tanggung jawab mutlak kebenaran data
		kelahiran;
		Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di
		luar wilayah NKRI yang sedang berkunjung ke
		Indonesia :
		a. surat keterangan kelahiran/surat pernyataan
		tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran;
		 b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
		c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
		dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
		d. surat keterangan pindah luar negeri.

No	KOMPONEN	URAIAN
		Pencatatan kelahiran OA :
		a. surat keterangan kelahiran/surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran;
		b. Dokumen Perjalanan; dan
		c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan
		e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta kelahiran.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	KOMPONEN	URAIAN
		mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
		 a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
		c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
		d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
		e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan yang telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan atas Undang-Undang
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan;
		b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
		tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
		Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
		Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
		Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
		Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
		diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah
		Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019
		tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
		Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19
		Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
	0 0	Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana	a. komputer (4 unit);
	dan/atau Fasilitas	b. printer dokumen (4 unit); dan c. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi	a. memahami Administrasi Kependudukan;
	Pelaksana	b. terampil mengoperasikan komputer dan
		teknologi informasi;
		c. mampu bersikap sopan, ramah dan
		komunikatif; dan
		d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas
5.	Internal Jumlah Pelaksana	Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
٥.	ouman relaksana	a. petugas administrasi (2 orang); danb. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan	a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di
	Pelayanan	Lingkungan Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan
		b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi
		Pegawai pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan	a. petugas pelayanan informasi;
	Keamanan dan	b. petugas parkir;
	Keselamatan	c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk
	Pelayanan	pelayanan tidak membahayakan pengguna
		layanan serta bersih dan rapi;
		d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan
		e. tersedia CCTV.
		o. torocara corv.

No	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

8. PENCATATAN LAHIR MATI

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan lahir mati: a. surat keterangan lahir mati; atau b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data dan mencetak dokumen; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen; dan e. petugas menyerahkan dokumen kepada masyarakat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	surat keterangan lahir mati.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No KOMPONEN	URAIAN
	mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
	a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
	 Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
	c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
	 d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
	e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas
5.	Internal Jumlah Pelaksana	Kependudukan dan Pencatatan Sipil. a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.



No	KOMPONEN	- 1. 17	URAIAN
8.	Evaluasi Kin Pelaksana	erja a.	rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan
		b.	melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

9. PENCATATAN PERKAWINAN

No	KOMPONEN	URAIAN
No 1.	Persyaratan	Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI: a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pas foto berwarna suami dan istri; c. KK; d. KTP-el; dan e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirka akta prcerainnya. Pencatatan perkawinan OA di wilayah NKRI: a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pas foto berwarna suami dan istri; c. Dokumen Perjalanan; d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; e. KK;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 f. KTP-el; dan g. izin dari negara atau perwakilan negaranya. a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
	T. /m	Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta perkawinan.

No	KOMPONEN	URAIAN
No 6.	KOMPONEN Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan; c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan); d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan e. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas
5.	Internal Jumlah Pelaksana	Kependudukan dan Pencatatan Sipil. a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPO	NEN	URAIAN	
8.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja		an cat gai

10. PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	surat keterangan pembatalan perkawinan.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	KOMPONEN	URAIAN
		mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
		a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
		d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
		e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
1	Description	d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPO	NEN	URAIAN
8.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	 a. rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

11. PENCATATAN PERCERAIAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan perceraian di wilayah NKRI: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta perceraian.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No KOMPONEN	URAIAN
	mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
	a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
	 Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
	c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
	d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
	e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan
		 b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

12. PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan pembatalan perceraian: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perceraian; c. KK; dan d. KTP-el.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	surat keterangan pembatalan perceraian.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	KOMPONEN	URAIAN
		mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
		a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
		 d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
		e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
4.	Pengawasan	d. disiplin dan taat waktu pelayanan. berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas
	Internal	Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); danb. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPONEN		URAIAN	
8.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	 a. rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 	

13. PENCATATAN KEMATIAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan kematian di wilayah NKRI: a. surat kematian; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi
		WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi OA.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta kematian.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	KOMPONEN	URAIAN
		mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
		a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
		b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
		c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
,		d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
		e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas
	Internal	Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); danb. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPONEN		URAIAN	
8.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	 a. rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 	

14. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan pengangkatan anak di wilayah NKRI: a. salinan penetapan pengadilan; b. kutipan akta kelahiran anak; c. KK orang tua angkat; dan d. KTP-el; atau e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	KOMPONEN	URAIAN
		mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
		a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
		c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
		d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
		e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan yang telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan atas Undang-Undang
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan;
		b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
		tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
		Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
		Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
		diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah
		Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019
		tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
		Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19
		Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana	a. komputer (4 unit);
	dan/atau Fasilitas	b. printer dokumen (4 unit); dan
		c. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi	a. memahami Administrasi Kependudukan;
	Pelaksana	b. terampil mengoperasikan komputer dan
		teknologi informasi;
		c. mampu bersikap sopan, ramah dan
		komunikatif; dan
4.	Pengawasan	d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
т.	Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); dan
	- water	b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan	a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di
	Pelayanan	Lingkungan Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan
		b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi
		Pegawai pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan	 a. petugas pelayanan informasi;
	Keamanan dan	b. petugas parkir;
	Keselamatan	c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk
	Pelayanan	pelayanan tidak membahayakan pengguna
		layanan serta bersih dan rapi;
		d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan
		yang berkebutuhan khusus; dan
		e. tersedia CCTV.

No	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kine Pelaksana	
		(IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebaga upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TOBA

15. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Sistem, Mekanisme	Pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI: a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA; b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; c. kutipan akta kelahiran anak; d. KK ayah atau ibu; e. KTP-el; atau f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA. Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: a. salinan penetapan pengadilan; b. kutipan akta kelahiran anak; c. KK ayah atau ibu; d. KTP-el; atau e. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA. a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan
200	dan Prosedur	dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta pengakuan anak dan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran.

6. Penanganan Aduan, Saran dan Masukan a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatata Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 lb. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 0823709 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan menci dalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad membuat jadwal pertemuan/pemb	
Masukan Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 lb. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 0823709 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencadalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan Pengaduan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan Pengaduan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan Pen	
b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 08237094 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencadalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
Ruang Pengaduan Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 0823709 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencadalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	3alige.
Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 08237094 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencadalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
c. Kotak pengaduan Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 0823709 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencadalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	an dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 0823709 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan menci dalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	3
d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 0823709 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencadalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	an dan
e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 0823709 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mendalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 08237093 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencadalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
g. Short Massage Service (SMS): 0823709 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan menca dalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan menca dalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	38301
mekanisme penanganan pengaduan sar masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mendistri adam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
masukan dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencadalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	an dan
a. Semua pengaduan diterima oleh Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan menci dalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencedalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
b. Pejabat Pengelola Pengaduan mence dalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	Pejabat
dalam buku pengaduan, dan mendistri aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
c. Pejabat Pengelola Pengaduan berko dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengad	
inembuat jadwai pertemuan/pem	
(jika diperlukan);	
d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyar	
hasil/jawaban atas aduan kepada 1	engadu
dan/atau pihak terkait; dan	2
e. Pejabat Pengelola Per	0
mendokumentasikan, menyusun lapor	
statistik pengelolaan pengaduan Pimpinan dan mempublikasikan	
pengaduan pada papan informasi d	
website setiap bulannya.	m/ alau

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
		Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
4.	Pengawasan Internal	d. disiplin dan taat waktu pelayanan. berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPO	NEN	URAIAN
8.	Evaluasi Pelaksana		

16. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI: a. kutipan akta kelahiran anak; b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum kelahiran anak; c. KK orang tua; dan d. KTP-el. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk OA di wilayah NKRI: a. kutipan akta kelahiran anak; b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum kelahiran anak; c. KK orang tua; dan d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: a. salinan penetapan pengadilan; b. kutipan akta kelahiran anak; c. KK ayah atau ibu; d. KTP-el; atau e. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
	Di/mic	Pencatatan Sipil.
4. 5.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
J.	Produk Pelayanan	kutipan akta pengesahan anak dan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran.

No	KOMPONEN	URAIAN
No 6.	ROMPONEN Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan; b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan; c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan); d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan e. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPONI	EN	URAIAN
8.	Evaluasi K Pelaksana	inerja l	 rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan
		1	 b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

17. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan perubahan nama Penduduk :
		a. salinan penetapan pengadilan;
		b. kutipan akta pencatatan sipil;
		c. KK;
		d. KTP-el; dan
		e. Dokumen Perjalanan bagi OA.
2.	Sistem, Mekanisme	a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan
	dan Prosedur	dan Pencatatan Sipil dengan membawa
		persyaratan;
		b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan
		Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta
		meregistrasi berkas;
		c. operator merekam data melalui pengentrian
		data;
		d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
		Sipil menandatangan dokumen secara
		elektronik; dan
		e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak
0.	Pelayanan	persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas
		pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil.
6.	Penanganan	a. Surat:
	Aduan, Saran dan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Masukan	Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige.
		b. Tatap Muka :
		Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
		c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com
		d. Email : disdukcapil.tobakab@gmail.come. Telepon : 082370938301
		f. Whattsapp: 082370938301
		g. Short Massage Service (SMS): 082370938301
		h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	KOMPONEN	URAIAN
	1	mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
	3	 Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
		c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
	1	 d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
	. 4	e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
		d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	Kependudukan dan Pencatatan Sipil. a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPON	EN	URAIAN
8.	Evaluasi F Pelaksana	Kinerja	insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan
			 melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

18. PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah NKRI: a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. kutipan akta pencatatan sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	KOMPONEN	URAIAN
		mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
		a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
		c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
		d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
		e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit); b. printer dokumen (4 unit); dan c. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPONE	1	URAIAN
8.	Evaluasi Kin Pelaksana	erja a.	rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan
		b.	melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

19. PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

KOMPONEN	URAIAN
Persyaratan	Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi Penduduk: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta pencatatan sipil;
	c. KK; dan d. KTP-el.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan
Janoka Waktu	kepada masyarakat melalui petugas. 1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak
Pelayanan	persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
Produk Pelayanan	catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran.
Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pelayanan Penanganan Aduan, Saran dan

No	KOMPONEN	URAIAN
		mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
		a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
		 d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
		e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
4.	Pengawasan	d. disiplin dan taat waktu pelayanan. berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas
5.	Internal Jumlah Pelaksana	Kependudukan dan Pencatatan Sipil. a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPONEN		URAIAN	
8.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	 a. rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 	

21. PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan; c. KK; dan d. KTP-el.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	surat keterangan pembatalan akta pencatatan sipil.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No KOMPON	EN URAIAN
	mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
	a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
	b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
	c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
	d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
	e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); dan b. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan e. tersedia CCTV.

No	KOMPONEN		URAIAN	
8.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	 a. rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; dan b. melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 	

20. PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pembetulan akta pencatatan sipil: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan b. kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan; b. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas; c. operator merekam data melalui pengentrian data; d. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangan dokumen secara elektronik; dan e. operator mencetak dokumen dan menyerahkan kepada masyarakat melalui petugas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta pencatatan sipil.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 a. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl. Mulia Raja No. 26 Balige. b. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. c. Kotak pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; d. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com e. Telepon: 082370938301 f. Whattsapp: 082370938301 g. Short Massage Service (SMS): 082370938301 h. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	KOMPONEN	URAIAN
		mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
		 Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
		 Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
		 d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
		e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan/atau website setiap bulannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	a. komputer (4 unit);b. printer dokumen (4 unit); danc. Jaringan SIAK.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. memahami Administrasi Kependudukan; b. terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; c. mampu bersikap sopan, ramah dan
		komunikatif; dan d. disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	berjenjang mulai dari kepala bidang ke kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Jumlah Pelaksana	a. petugas administrasi (2 orang); danb. operator SIAK (4 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	 a. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba; dan b. adanya Kode Etik dan Aturan Perilaku bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. petugas pelayanan informasi; b. petugas parkir; c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan serta bersih dan rapi; d. sarana dan prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus; dan

No	KOMPONEN		URAIAN		
8.	Evaluasi K Pelaksana	inerja			
			pelayanan.		